**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN SANKSI
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN
(Studi di Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai)**

Oleh :

¹Fira Nahda Rizkina, Faisal ², Agusta Ridha Minin³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : ¹Firanahda03@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics has shifted the legal policy direction for drug users as victims, from a punitive approach to one focused on rehabilitation. In reality, however, many cases still see judges sentencing victims of drug abuse to prison sentences. The purpose of this research is to understand the legal regulations for drug users as victims, to examine the mechanism of criminal law enforcement for drug users as victims, and to identify the challenges in applying the criminal law mechanism to drug users.

This research is a normative legal study. The approach used in this research is a juridical-sociological and legislative approach. This research is descriptive in nature. The legal materials used in this research are secondary data sources. The data collection tool used in this research is document study. This research employs a qualitative data analysis method.

Based on the research findings, as stipulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics, there is a distinction between drug users, traffickers, and producers. The enactment of Law No. 35 of 2009 has changed the paradigm of sentencing drug users as victims who must undergo rehabilitation. The mechanism for the application of criminal law to drug users as victims should focus on rehabilitation and recovery, not merely on the imposition of criminal sanctions. This approach includes comprehensive rehabilitation programs and recovery facilities aimed at helping users overcome addiction, reducing social stigma, and enhancing their social reintegration. A rehabilitation-based mechanism is more effective in reducing recidivism and supports the principles of social justice and human rights protection. The challenges in applying the criminal law mechanism to drug users as victims include a repressive legal paradigm, limited rehabilitation facilities, social stigma, lack of supporting legislation, and inconsistency in law enforcement. These barriers prevent drug users from receiving adequate recovery, causing them to often be criminalized. Therefore, legal reform and resource enhancement are needed to establish a more effective and humane legal protection mechanism.

Keywords : Policy, Sanction, Narcotics, Users

ABSTRAK

Terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merubah arah kebijakan hukum bagi pengguna narkotika sebagai korban, yang awalnya bersifat punitif menuju kearah rehabilitasi. Kenyataannya dalam banyak kasus ternyata masih banyak hakim yang memutuskan korban penyalahgunaan narkotika dihukum pidana kurungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengguna narkotika sebagai korban, untuk mengetahui mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban dan kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis serta perundang- undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan data yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan peran antara pengguna, pengedar, dan produsen narkotika. Penerapan UU tersebut telah mengubah pandangan dalam sistem peradilan, di mana pengguna narkotika kini diperlakukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan sekadar dihukum. Mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban seharusnya fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar pemberian sanksi pidana. Pendekatan ini mencakup program rehabilitasi komprehensif dan fasilitas pemulihan yang bertujuan membantu pengguna keluar dari ketergantungan, mengurangi stigma sosial, dan meningkatkan reintegrasi sosial mereka. Mekanisme berbasis rehabilitasi lebih efektif dalam menekan residivisme dan mendukung prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia. Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban meliputi paradigma hukum yang represif, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, kurangnya legislasi pendukung, dan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Hambatan-hambatan ini menghalangi pengguna narkotika untuk mendapatkan pemulihan yang layak, sehingga mereka sering kali terkriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan sumber daya untuk mewujudkan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dan humanis.

Kata kunci: Kebijakan, Sanksi, Narkotika, Pengguna

1. PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*recht staat*), bukan sekadar kekuasaan (*machstaat*)."¹ Hukum yang dirancang oleh pembuat kebijakan dan legislator bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi salah satu instrumen hukum yang berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran A. Ross, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum berperan dalam membentuk serta menjaga harmoni dalam kehidupan sosial¹.

Hukum berfungsi dengan menetapkan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga sanksi diberlakukan bagi siapa saja yang melanggarnya. Pada dasarnya, hukum disusun untuk dipatuhi. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan, yang berakibat pada terganggunya keamanan dan ketertiban publik. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.

Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semisintesis. Zat ini memiliki efek yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan hingga menghapus rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan

ketergantungan.

Fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkotika kini telah menjadi permasalahan regional, nasional bahkan internasional. Berbagai negara di seluruh dunia sedang berusaha untuk memerangi permasalahan narkotika yang marak terjadinya di negaranya. Ironisnya, zat yang sudah jelas diketahui sebagai zat yang berbahaya justru masih disalahgunakan dan diperjualbelikan oleh orang tak bertanggung jawab. Penyebarannya yang kian menyebar keberbagai lapisan masyarakat bahkan ke anak dibawah umur menjadikan permasalahan narkotika sebagai permasalahan yang serius.²

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting dalam pengobatan penyakit tertentu. Untuk memastikan ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam bidang medis dan layanan kesehatan, pemerintah mengatur secara hukum berbagai aspek terkait, seperti distribusi, impor, ekspor, penanaman, serta penggunaannya secara terkendali. Pengawasan yang ketat diterapkan dengan mengintegrasikan kebijakan ini ke dalam strategi sosial dan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang berpotensi merugikan dan membahayakan masyarakat, diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang tegas dan berkelanjutan.³

Dari perspektif yuridis, peredaran psikotropika di Indonesia diakui secara sah. Regulasi yang ada hanya melarang penggunaan psikotropika tanpa izin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, dalam praktiknya, terjadi banyak penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan tujuan medis. Lebih dari sekadar kepentingan kesehatan, psikotropika sering

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 44.

² Jumriani Nawawi, "Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis Dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika",

Disertasi (Tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021), hlm. 1.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 6.

kali dijadikan komoditas bisnis yang berdampak negatif, terutama dalam merusak kondisi mental, baik secara fisik maupun psikologis, khususnya di kalangan generasi muda⁴.

Pengertian mengenai penyalahguna, pengguna, dan pecandu narkotika dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 15, penyalahguna didefinisikan sebagai orang yang memakai narkotika tanpa izin atau melawan hukum. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 13, pecandu narkotika adalah orang yang mengonsumsi atau menyalahgunakan narkotika hingga mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun mental. Adapun Pasal 1 angka 14 menjelaskan bahwa ketergantungan narkotika terjadi secara berkelanjutan dengan dosis yang meningkat untuk mempertahankan efek yang sama. Jika penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara mendadak, dapat muncul gejala fisik dan psikologis yang khas⁵.

Narkotika dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam Islam, meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkotika, akan tetapi karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras. Dalam perspektif hukum Islam adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar yang dapat mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta

merusak keutuhan beragama.

Diantara ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang nudharatnya narkotika termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْبِرُ وَالنَّصَابُ وَالزُّلْمُ رَجُومٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُجَازِيْهُنَّ لَعْنَةُ اللّٰهِ يُظَاهَرْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, menyembelih hewan untuk berhala, dan mengundi nasib menggunakan panah adalah perbuatan keji yang termasuk dalam tindakan setan. Oleh karena itu, hindarilah hal-hal tersebut agar kalian memperoleh keberuntungan.

Meskipun di sisi lain mengandung manfaat tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan penelitian dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam konsumsi saja yang membahayakan dan diharamkan akan tetapi dari segi transaksi dan distribusi juga haram dari hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa jual beli barang-barang yang membawa kemudharatan itu diharamkan.⁶

Menurut data yang dihimpun dari situs resmi Badan Narkotika Nasional (BNN), Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 telah terjadi 1.184 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkotika) di Indonesia, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang jumlah. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.784 orang dan barang

⁴ Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna narkotika itu sendiri, antara lain pecandu narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, manta pecandu narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalah guna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan

implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Hatarto Pakpahan, "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2014), hlm. 3.

⁶ Faisal, *Hukuman Mati Bagi Pengekar Narkotika Di Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 13.

bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 sejak Januari hingga Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 1.625 orang⁷. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba harus segera diselesaikan mengingat angka kasusnya semakin tahun semakin meningkat. Tindak pidana narkoba telah menghancurkan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan negara. Hingga kini, jutaan individu terperangkap dalam penyalahgunaannya, sementara ribuan nyawa telah melayang akibat dampak buruk narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi. Tidak hanya menjangkit di wilayah perkotaan saja, saat ini bahkan pasar yang ada dirasakan meluas ke berbagai pelosok daerah, salah satu contohnya di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Sebagai wilayah yang sangat strategis karena berada dekat dengan wilayah perairan atau pelabuhan, Tanjungbalai telah menjadi salah satu pasar narkoba yang di dalamnya banyak terdapat sindikat jaringan peredaran narkoba. Telah banyaknya penangkapan dan penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran unit Narkoba Polres Tanjungbalai tidak menyurutkan pelaku, baik itu produsen, pengedar ataupun pengguna untuk berhenti berurusan dengan narkoba. Hal itu dapat dilihat dari data yang didapat dari Satuan Unit Narkoba Polres Tanjungbalai dari tahun ke tahun dimana kasus narkoba yang terjadi cukup tinggi. Data ini tentu belum termasuk kasus-kasus yang tidak terdeteksi, belum terdeteksi, atau yang tidak ditangani oleh pihak kepolisian.

Masalah penyalahgunaan narkoba

⁷DPR, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung%20Rehabilitasi%20Pecandu%20Narkoba%20di%20Rindam,%20Puan:%20Bisa%20Dibarengi%20dengan%20Program%20Be%20la%20Negara>, (Senin, 25 Maret 2024, 10.58).

⁸ Paul Ricardo, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi

dikalangan masyarakat yang masih tinggi akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan sebuah upaya yang dilakukan sebelum penyalahgunaan narkoba terjadi. Sementara upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pada saat penyimpangan sosial telah terjadi, atau dengan kata lain ketika telah terjadi penyalahgunaan narkoba⁸. Jumlah penyalahgunaan narkoba yang tinggi mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi penggunanya, mulai dampak fisik, dampak psikis serta dampak lingkungan sosial sehingga dapat merusak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi maraknya peredaran gelap narkoba adalah melibatkan langsung masyarakat dalam pengawasannya yang tertuang dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Reaksi sosial dan *Cultural* masyarakat Indonesia yang dikatakan Negara Berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran (*sosial control*) sesama masyarakat masih kurang tanggap dalam pengawasannya, berbeda dengan Negara maju yang masyarakatnya sendiri taat dan sudah rasional terhadap tertib hukum⁹.

Dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba yang masih marak, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menindak sindikat dan pengedar melalui pemberian sanksi berat, termasuk hukuman mati. Sementara itu, bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, pemerintah berusaha meminimalkan dampak negatifnya dengan

Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. III (Desember 2010), hlm 239.

⁹ Cuncun Kurniadi, "Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia", *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1 (September 2019), hlm. 56.

menyediakan fasilitas rehabilitasi, baik dari segi medis maupun sosial¹⁰.

Inisiatif ini bertujuan untuk memulihkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjadi pribadi yang produktif, mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, serta menjadi generasi yang sehat dan tangguh bagi bangsa. Namun, implementasi kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba masih belum berjalan secara optimal karena adanya hambatan dalam ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Narkoba. Sampai saat ini, korban penyalahgunaan narkoba masih dianggap sebagai pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan yang maksimal karena harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan¹¹.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris berfokus pada pemberlakuan atau implementasi hukum normatif dalam praktiknya terhadap berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Metode ini dilakukan dengan meneliti kondisi nyata di lapangan guna memperoleh dan mengidentifikasi fakta serta data yang relevan. Setelah data terkumpul, penelitian ini diarahkan pada identifikasi masalah yang kemudian berujung pada upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata serta berfungsi dalam sistem kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan (State Approach), yang berfokus pada analisis terhadap produk-produk hukum dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang berlaku.

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan informan yang ada di Kantor Badan Narkoba Nasional Kota Tanjung balai.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan-Peraturan yang mengatur mengenai narkoba dan rehabilitasi di Indonesia mencakup beberapa regulasi utama, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, serta Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi.

¹⁰ Alpi Sahari, dkk. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Double Track System", *Jurnal Hukum: Legalitas*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2022), hlm. 2.

¹¹ Triono Eddy, dkk. "Penerapan Rehabilitasi

Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)", *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2022), hlm. 7.

2. Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk publikasi yang membahas hukum tetapi bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi ini mencakup buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau analisis terhadap putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti bibliografi dan indeks kumulatif. Bahan ini berfungsi sebagai referensi atau petunjuk dalam bidang hukum, mencakup abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan sumber sejenis lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Narkotika dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia.

Istilah narkotika sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai fenomena berbahaya yang meresahkan. Selain itu, sering digunakan pula istilah narkona (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan istilah NAPZA sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah ini mengacu pada kelompok zat yang berpotensi menimbulkan

ketergantungan atau kecanduan. Narkotika dan psikotropika, yang sering disebut sebagai Narkoba atau NAPZA, menjadi fokus utama perhatian. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, beberapa ketentuan terkait psikotropika kini telah diintegrasikan dalam regulasi tersebut¹².

Secara umum, narkotika merujuk pada kelompok zat yang, ketika masuk ke dalam tubuh, dapat memberikan pengaruh terhadap tubuh pengguna yang bersifat:

- a. Menenangkan
- b. Merangsang
- c. Menimbulkan Khayalan.

Secara etimologi, narkotika¹³ berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan frasa “*narcosis*” yang berarti membius¹⁴.

Secara umum, narkotika adalah jenis zat yang dapat memberikan pengaruh tertentu kepada individu yang mengonsumsinya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.¹⁵ Istilah yang digunakan bukanlah “*narcotics*” dalam farmakologi, melainkan istilah “*drug*” yang memiliki makna serupa, yaitu sejenis zat yang, ketika digunakan, dapat menimbulkan efek dan pengaruh tertentu pada tubuh penggunanya, yaitu:

- a. Memengaruhi tingkat kesadaran
- b. Menimbulkan dorongan yang dapat memengaruhi perilaku manusia

¹² Cardio S. Butar-Butar, “*Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*”, *Tesis* (Tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020), hlm. 35.

¹³ Frasa narkotika dalam beberapa literatur disebut berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari frasa “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju,

2003), hlm. 35. Secara farmakologis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bening atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant. Bambang Hariyono, “*Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*” *Tesis* (Tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diopnegoro Semarang, 2009), hlm. 56.

¹⁴ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.21

¹⁵ Hari Sasangka, *op.cit.*, hlm. 33

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- 1) Penenang
- 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:¹⁶

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif merupakan istilah medis yang mengacu pada kelompok zat yang, saat dikonsumsi, dapat menyebabkan ketergantungan serta memengaruhi fungsi otak (psikoaktif). Kelompok ini mencakup obat-obatan, bahan, atau zat yang penggunaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya, serta zat yang tidak diatur namun sering disalahgunakan, seperti alkohol, nikotin, kafein, dan inhalansia/solven. Oleh karena itu, penggunaan istilah NAPZA dianggap lebih tepat, karena lebih sesuai dengan terminologi yang digunakan dalam regulasi mengenai Narkotika dan Psikotropika.¹⁷

Narkotika, atau lebih tepat disebut

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), merupakan obat, bahan, atau zat yang tidak termasuk dalam golongan makanan. Artinya, jika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, baik melalui hirupan, hisapan, telan, atau suntikan, zat tersebut akan memengaruhi sistem saraf pusat (otak) dan menimbulkan efek ketergantungan. Akibatnya, fungsi otak dan organ-organ vital lainnya seperti jantung, sistem pernapasan, peredaran darah, dan sebagainya akan mengalami perubahan: meningkat saat zat tersebut dikonsumsi, tetapi menurun atau menjadi tidak stabil ketika penggunaannya dihentikan¹⁸.

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa narkotika adalah zat yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh spesifik terhadap tubuh seseorang yang mengonsumsinya, biasanya melalui berbagai metode seperti disuntikkan, dihirup, atau ditelan. Zat ini dapat menimbulkan berbagai efek, mulai dari pembiusan yang menyebabkan hilangnya kesadaran sementara, hingga penghilang rasa sakit yang sering digunakan dalam dunia medis. Selain itu, narkotika juga dapat memberikan rangsangan terhadap semangat atau energi seseorang, meskipun efeknya bersifat sementara. Penggunaan narkotika juga sering kali mengarah pada halusinasi atau munculnya khayalan yang tidak sesuai dengan kenyataan,¹⁹ akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi persepsi pengguna terhadap lingkungan di sekitarnya. Efek-efek tersebut berisiko berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan medis, karena dapat menimbulkan ketergantungan serta gangguan pada sistem saraf dan kondisi mental.

Saat ini, tingkat penggunaan narkotika ilegal di Indonesia telah

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia* (Bandung: Karya Nusantara, 2011), hlm. 14.

¹⁷ Bambang Hariyono, *op. cit.*, hlm. 55

¹⁸ Lydia Harlina Marono dan Satya Joewana,

Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5.

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 7

mencapai angka yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang terbebas dari peredaran narkotika dan psikotropika ilegal²⁰. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah resmi, setiap tahun terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan, di mana upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika yang telah dilakukan belum berhasil secara efektif mengurangi jumlah pengguna narkoba di berbagai lapisan masyarakat.

B. Klasifikasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, karena dampaknya yang luas dan kompleks, memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu yang menggunakannya, tetapi juga berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban negara. Dampak besar dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak struktur keluarga, meningkatkan tingkat kriminalitas, dan menurunkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Meskipun masalah

kesehatan tetap menjadi fokus utama, bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika juga mencakup gangguan mental, kecanduan, dan kematian dini. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan, terutama di Indonesia, di mana angka penyalahgunaannya masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan masalah ini harus ditingkatkan dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, agar dampak buruknya dapat diminimalkan dan masa depan generasi muda dapat terlindungi²¹.

Fakta tersebut di atas dapat dilihat dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2021 yang menunjukkan bahwa klasifikasi tertinggi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) adalah perkara narkotika. Pada tahun 2018, jumlah perkara narkotika yang diputus sebanyak 47.573²². Jumlah tersebut kemudian meningkat pada 2019 sejumlah 50.102 perkara,²³ dan meningkat lagi pada tahun 2020 sebanyak 51.443 perkara²⁴. Tahun 2021, jumlah perkara narkotika yang diputus menurun menjadi 50.448.²⁵

Tingginya penanganan perkara narkotika di lingkungan peradilan berimplikasi pada situasi kelebihan penghuni (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

²⁰ Lidya Christin Sinaga, "Indonesia di Tengah Bisnis Narkoba Ilegal Global", <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/32-lidya-christin-sinaga>, (Jum'at 9 September 2024).

²¹ Choirul Nur Akrom, dkk., "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang", *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3 (April 2024), hlm. 150

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahun 2018: Era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), hlm. 108.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), hlm. 113.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2020 dalam Suasana Covid-19: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), hlm. 131

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2020 Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), hlm. 101

tahun 2021, jumlah penghuni Rutan dan Lapas sebanyak 266.828 dari total kapasitas yang hanya 135.561²⁶. Jumlah tersebut terus bertambah pada April 2022 tercatat ada 273.822 Warga Binaan Pemsayarakatan (WBP), 135.758 di antaranya merupakan WBP kasus narkoba²⁷. Artinya, 49,57% dari seluruh WBP di Indonesia terkait tindak pidana narkoba. Angka tersebut menunjukkan dari 135.758 WBP perkara narkoba tersebut, sebanyak 120.042 atau sebesar 88% diproses pidana karena menggunakan narkoba (pengguna, bukan pengedar)²⁸.

Berdasarkan data tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari aparat penegak hukum untuk dapat membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Pemahaman yang seragam di antara semua pihak terkait akan mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan penilaian yang menyeluruh dan tepat, sehingga dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum bagi pecandu, penyalahguna, serta korban penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya kesepahaman ini, proses penegakan hukum akan lebih efektif, transparan, dan memperhatikan berbagai aspek, termasuk kesehatan, rehabilitasi, dan pencegahan, sehingga penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir di masa depan.

Pengertian pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 UU Narkoba mengatur bahwa pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam

keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan secara fisik adalah kondisi di mana seseorang yang telah mengalami ketergantungan pada suatu jenis narkoba akan merasakan berbagai gejala fisik yang tidak nyaman atau bahkan menyakitkan apabila penggunaan narkoba tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu atau jika penggunaannya dihentikan secara tiba-tiba. Gejala-gejala fisik ini dapat berupa rasa mual, pusing, kelelahan ekstrem, tremor, kram otot, hingga gangguan pada sistem pernapasan dan detak jantung, tergantung pada jenis narkoba yang dikonsumsi. Dalam keadaan ketergantungan ini, tubuh individu tersebut secara fisiologis telah terbiasa dengan keberadaan zat tersebut, sehingga ketika zat tersebut tidak ada atau tidak lagi dikonsumsi, tubuh bereaksi dengan menunjukkan gejala-gejala penarikan yang menandakan adanya ketergantungan fisik yang signifikan.

Ketergantungan secara psikis adalah kondisi di mana seseorang yang menyalahgunakan narkoba merasa sangat tergantung secara mental dan emosional pada zat tersebut, sehingga timbul perasaan tidak nyaman, gelisah, atau bahkan cemas berlebihan apabila jenis narkoba yang biasanya dikonsumsi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Individu yang mengalami ketergantungan psikis cenderung merasa bahwa narkoba tersebut adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah, meredakan stres, atau memperoleh kebahagiaan, sehingga muncul dorongan kuat untuk terus menggunakannya. Ketika narkoba tidak

²⁶ Panggih Subagyo, "Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan", <http://www.ditjenpas.go.id/menguraipermasalahan-overcrowded-di-lapasrutan> (Minggu, 9 September 2024).

²⁷ Alif Karnadi, "Mayoritas Penghuni Lapas Indonesia Dari Kasus Narkoba" <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas->

[penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba](https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba) (Minggu, 9 September 2024).

²⁸ Tim Penulis Indonesia Judicial Research Society (IJS), *Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkoba (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJS), 2024), hlm. 3.

ada, mereka mungkin merasakan kehilangan kontrol emosi, gangguan konsentrasi, perubahan suasana hati yang drastis, dan rasa kekosongan yang mendalam, yang memperkuat keinginan mereka untuk kembali menggunakan zat tersebut sebagai bentuk pelarian dari perasaan tidak nyaman tersebut.

Banyak asumsi yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa seseorang dapat dikenali sebagai pecandu narkoba hanya dengan melihat perubahan pada raut wajah dan postur tubuh mereka. Menurut pandangan ini, ciri-ciri fisik seperti wajah yang terlihat pucat, mata yang cekung, tubuh yang kurus, atau postur yang lemah sering kali diasosiasikan dengan pengguna narkoba. Namun, asumsi tersebut tidak dapat dijadikan patokan yang akurat untuk memastikan apakah seseorang benar-benar seorang pecandu narkoba.

Meskipun beberapa pecandu narkoba mungkin menunjukkan gejala fisik tertentu akibat penggunaan narkoba, banyak faktor lain yang memengaruhi penampilan fisik seseorang, seperti kondisi kesehatan, pola makan, atau stres. Selain itu, tidak semua pecandu narkoba akan menunjukkan tanda-tanda fisik yang jelas, terutama jika mereka berada pada tahap awal penggunaan atau memiliki akses ke perawatan medis yang memadai. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi seseorang sebagai pecandu narkoba, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam dan menyeluruh, melalui pemeriksaan medis, psikologis, atau tes laboratorium, bukan hanya berdasarkan penampilan fisik²⁹.

Terdapat beberapa cara yang mudah untuk mengidentifikasi seseorang yang telah menjadi pecandu narkoba. Beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali pada pecandu narkoba antara

lain:

1. Pecandu ganja biasanya menunjukkan beberapa ciri-ciri, seperti cenderung lesu, mata yang memerah, kelopak mata yang terlihat selalu mengantuk, nafsu makan yang meningkat karena sering merasa lapar, serta mudah tertawa ketika terlibat dalam percakapan yang dianggap lucu.
2. Pecandu putaw umumnya memiliki beberapa tanda, seperti sering menyendiri di tempat gelap sambil mendengarkan musik, enggan mandi karena merasa kedinginan, tubuh yang tampak kurus dan lemah, serta sikap apatis atau kurang tertarik pada lawan jenis.
3. Pecandu inek atau ekstasi umumnya menunjukkan tanda-tanda seperti sering keluar rumah, tampak ceria saat mendengarkan musik berirama cepat seperti musik house, wajah yang terlihat lelah, bibir yang sering pecah-pecah, tubuh yang sering berkeringat, serta merasa minder atau kurang percaya diri setelah efek dari inek menghilang.
4. Pecandu sabu-sabu umumnya menunjukkan beberapa tanda, seperti mudah merasa gelisah dan canggung dalam berbagai situasi, enggan menatap mata saat berbicara, mata yang sering jelalatan, sifat yang sangat curiga, terutama terhadap orang yang baru dikenal, tubuh yang sering berkeringat meskipun berada di ruangan ber-AC, serta mudah marah dan sangat sensitif³⁰.

Penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, penting untuk memahami dasar hukum yang mengatur dan melegitimasi penggunaan narkoba. Ini mencakup peninjauan terhadap peraturan dan undang-undang yang

²⁹ Ranu Mahesti, "Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Lembaran Masyarakat Jurnal*

Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 4, No. 1 (Januari- Juni 2018), hlm. 58.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

berlaku, yang menetapkan syarat, batasan, dan izin yang diperlukan untuk penggunaan narkoba secara sah. Dengan memahami kerangka hukum tersebut, kita dapat menilai apakah tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau melanggar hukum. Hal ini penting agar setiap penilaian atau keputusan mengenai legalitas suatu perbuatan didasarkan pada pemahaman yang jelas dan tepat tentang hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum.

Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh keinginan yang kuat dan berkelanjutan untuk menggunakan narkoba, seringkali dengan meningkatkan dosis atau takaran penggunaan untuk mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena tubuh dan pikiran telah terbiasa dengan zat tersebut, sehingga memerlukan dosis lebih besar untuk merasakan efek serupa. Selain itu, jika penggunaan narkoba dikurangi atau dihentikan secara mendadak, individu yang bergantung pada zat tersebut dapat mengalami gejala fisik dan psikologis yang khas. Gejala fisik dapat mencakup mual, keringat dingin, tremor, dan nyeri otot, sementara gejala psikologis meliputi kecemasan, depresi, gangguan tidur, serta perubahan mood yang ekstrem. Ketergantungan ini mengganggu keseimbangan fisiologis dan psikologis seseorang, membuatnya sulit untuk berhenti tanpa dukungan dan perawatan yang tepat³¹.

Penyalahgunaan narkoba adalah

salah satu bentuk perilaku menyimpang yang semakin marak terjadi dalam masyarakat saat ini, mencerminkan perubahan dalam norma sosial dan moral terkait penggunaan zat terlarang. Perilaku ini mencakup berbagai tindakan ilegal, seperti mengonsumsi narkoba dalam dosis berlebihan atau tidak sesuai dengan anjuran medis, memperdagangkan narkoba secara ilegal tanpa izin yang sah, serta melakukan tindakan lain yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba tidak hanya memberikan dampak negatif bagi pelaku, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dampak langsung yang terlihat adalah munculnya tindak pidana lain, seperti pencurian, pembegalan, dan perampokan. Meskipun demikian, penyalahgunaan narkoba sering kali dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*),³² hal ini karena pada awalnya, tidak terlihat adanya individu lain yang menjadi korban langsung dari tindakan tersebut. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, penyalahgunaan narkoba ini memiliki dampak yang luas, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik dan mental pengguna, kesejahteraan keluarga mereka, serta stabilitas sosial secara umum.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pengguna

pelakunya biasanya melakukan aksinya dengan cara yang sangat tersembunyi, hanya diketahui oleh segelintir orang. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan semacam ini menjadi sangat menantang. Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021), hlm. 122.

³¹ *Ibid.*, hlm. 57.

³² Dina Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4 (2017), hlm. 921. Menurut Fletcher, kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) tidak berarti bahwa kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali; sebaliknya, dalam kasus ini, pelaku itu sendiri sering kali menjadi korban. Kejahatan yang dalam kriminologi dikenal sebagai "*crime without victim*" ini sangat sulit untuk diidentifikasi karena

- narkotika sebagai korban adalah bahwa pendekatan hukum yang ideal seharusnya memperlakukan pengguna narkotika dengan pendekatan yang lebih humanis, memandang mereka sebagai korban ketergantungan yang memerlukan bantuan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Kebijakan hukum yang efektif hendaknya mengutamakan rehabilitasi dan perlindungan daripada sanksi pidana, dengan menyediakan akses ke fasilitas rehabilitasi yang memadai serta dukungan sosial untuk membantu pemulihan dan reintegrasi pengguna ke dalam masyarakat.
2. Mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban adalah bahwa pendekatan hukum yang diterapkan seharusnya menekankan rehabilitasi dan pemulihan daripada sekadar pemberian sanksi pidana. Dengan memandang pengguna narkotika sebagai korban ketergantungan, mekanisme hukum yang ideal harus menyediakan jalur alternatif berupa program rehabilitasi yang komprehensif dan fasilitas pemulihan yang memadai. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pengguna keluar dari ketergantungan, mengurangi stigma sosial, serta meningkatkan peluang reintegrasi sosial mereka. Mekanisme yang berbasis rehabilitasi tidak hanya lebih efektif dalam menekan angka residivisme tetapi juga lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.
 3. Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban adalah bahwa berbagai hambatan, seperti paradigma hukum yang keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, kurangnya legislasi yang mendukung dalam penegakan hukum, menjadi penghalang utama dalam mengimplementasikan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi. Kendala-kendala ini menghambat

pengguna narkotika untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai, sehingga pendekatan hukum yang seharusnya melindungi mereka sebagai korban justru kerap berakhir pada kriminalisasi. Untuk itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan dukungan sumber daya agar mekanisme perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan hukum yang memandang pengguna narkotika sebagai korban ketergantungan, dengan menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan daripada penegakan hukum yang bersifat represif. Kebijakan ini harus mencakup pengaturan yang lebih jelas tentang pengalihan kasus pengguna narkotika ke program rehabilitasi, serta memisahkan mereka dari pelaku kriminal yang terlibat dalam peredaran narkotika.
2. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menyesuaikan kebijakan hukum pidana dengan memberikan prioritas lebih besar pada rehabilitasi daripada penghukuman. Hal ini bisa dicapai dengan merumuskan peraturan yang secara eksplisit mengatur pengalihan kasus pengguna narkotika ke program rehabilitasi, baik yang berbasis medis maupun psikososial, guna memastikan mereka mendapatkan perawatan yang tepat. Penting bagi negara untuk memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitas rehabilitasi narkotika yang ada, serta memastikan bahwa fasilitas ini mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Pemerintah juga perlu menyediakan program rehabilitasi berbasis komunitas yang lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Salah satu hambatan terbesar adalah stigma sosial terhadap pengguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan

program edukasi dan kesadaran yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya memandang pengguna narkoba sebagai korban yang membutuhkan dukungan, bukan sebagai pelaku kriminal. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, sekolah, dan lembaga sosial untuk mengurangi diskriminasi dan memberikan ruang bagi pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Amrani, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Yesmil, Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawie, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Ananta.
- _____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Hakim. 2017. *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- _____. 2012. *Kejahatan Narkoba dan Psikitropika*. Jakarta: Kawah Media.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. *Hukum Narkoba Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. 2011. *Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Edyyono, Supriyadi Widodo, dkk. 2017. *Kertas Kerja Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Faisal. 2017. *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Di Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunarsa, Singgih D. 1991. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Gunawan, Ricky, et.al. 2021. *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Pengguna Narkoba: Perbaikan Tata Kelola Narkoba Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hawari, Dadang. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alcohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta: Gaya Baru.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar, Anang. 2015. *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif*. Karawang: Viva Tanpas.
- Iswanto. 2009. *Viktimologi*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Johari. 2019. *Reorientasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perumahan*. Cetakan Pertama.

- Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Kaligis, O.C. 2012. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*. Jilid 7. Bandung: PT Alumni.
- Krisnawaty, Dani, Eddy O.S. Hiariej. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kusno, Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud M.D., Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Laporan Tahun 2018: Era baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- _____. 2020. *Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- _____. 2021. *Laporan Tahunan 2020 Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- _____. 2021. *Laporan Tahunan 2020 dalam Suasana Covid-19: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marono, Lydia Harlina, Satya Joewana. 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramadhan, Choky R., dkk. 2019. *Anomali Kebijakan Narkotika*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rodiyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Sari, C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiadji, Sutarno. 2006. *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Bahaya!*. Jakarta: UI-Press.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35*

- Tahun 2009. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Jakarta: Teraju.
- Sujono AR, Daniel Bony. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sumaryanto, A Djoko. 2020. *Kapita Selekta Pidana Khusus*. Surabaya: UBHARA Press.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2004. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Susanti, Dyah Octorina, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syaukani, Imam, A. Ahsin Thoari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Penulis Indonesia Judicial Research Society (IJRS). 2024. *Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS).